LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2016

DEPUTI BIDANG PENELITIAN DAN KERJASAMA STANDARDISASI

BADAN STANDARDISASI NASIONAL
2017

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016

DEPUTI BIDANG PENELITIAN DAN KERJASAMA STANDARDISASI

BADAN STANDARDISASI NASIONAL
2017

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai salah satu unit eselon I BSN, Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi (Deputi PKS) mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang perumusan standar, penelitian dan pengembangan serta kerjasama di bidang standardisasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi PKS berpedoman pada perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang telah ditetapkan oleh BSN, dalam rangka untuk menjamin bahwa pencapaian visi, misi, serta tujuan Deputi PKS mampu mendukung pencapaian sasaran dan tujuan organisasi BSN secara keseluruhan. Pencapaian target kinerja utama Deputi PKS tahun 2016 sebagai berikut :

Pencapaian Target Kinerja Utama Deputi PKS Tahun 2016

Sasaran Strategis BSN	Sasaran Strategis Deputi PKS	Indikator Kinerja Deputi PKS	Target dan Realisasi 2016		
			Target	Realisasi	%
Meningkat-nya kapasitas dan kualitas pengemba-ngan SNI	1. Tersedianya SNI yang siap ditetapkan sesuai dengan kebijakan pengembangan standar *	1. Jumlah SNI yang siap ditetapkan sesuai kebutuhan pasar	500 SNI	495 SNI	99
	2. Tersedianya rekomendasi hasil kesepakatan kerjasama untuk pengemba-ngan SNI	2. Persentase rekomendasi hasil kerjasama standardisasi yang mendukung pengembangan SNI	75%	60%	80
	3. Tersedianya hasil penelitian yang mendukung pengembangan Standardisasi **	3. Persentase hasil penelitian yang mendukung pengembangan Standardisasi	75%	82%	109

Keterangan : * Target RASNI diubah menjadi target SNI
** Pengembangan SNI diganti menjadi pengembangan standardisasi

Pagu anggaran Deputi PKS tahun 2016 adalah sebesar Rp. 14.969.761.000,-. Realisasi serapan anggaran DIPA tahun 2016 Deputi PKS adalah sebagai berikut:

Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Tahun 2016 Deputi PKS - BSN

Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Perumusan Standar	5.183.795.000	5.120.006.129	98,77
Kerjasama Standardisasi	5.317.846.000	4.166.943.659	78,36
Penelitian dan Pengembangan Standardisasi	4.468.120.000	3.429.417.951	76,75
Total	**14.969.761.000**	**12.716.367.739**	**84,95**

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **II**
DAFTAR ISI ..... **III**
DAFTAR TABEL ..... **V**
DAFTAR GAMBAR ..... **VI**
BAB I PENDAHULUAN **1**
I.1 Kondisi Umum 1
I.2. Isu - Isu Strategis yang Dihadapi 6
I.3. Sistematika dan Ruang Lingkup Laporan 8
BAB II PERENCANAAN KERJA **10**
II.1 Umum 10
II.2. Rencana Strategis 2015-2019 12
II.3. Visi 13
II.4. Misi 13
II.5. Tujuan 13
II.6. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 14
II.7. Kebijakan Deputi PKS 14
II.7.1 Strategi Unit Kerja Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Deputi PKS ... 15
II.7.2 Program dan Kegiatan Deputi PKS Tahun 2016 17
BAB III AKUNTABILITAS KERJA **23**
III.1 Capaian Kinerja Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi 23
III.1.1 Indikator kinerja pertumbuhan kontribusi SPK terhadap ekspor produk unggulan nasional 23
III.1.2 Indikator kinerja persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan 24
III.1.3 Indikator kinerja jumlah SNI yang difasilitasi pengembangannya 25
III.1.4 Indikator kinerja jumlah SNI yang siap ditetapkan 26
III.1.5 Indikator kinerja persentase hasil penelitian yang mendukung pengembangan standardisasi sebagai berikut 26
III.1.6 Indikator kinerja jumlah kajian/ penelitian yang mendukung penilaian kesesuaian 28
III.1.7 Indikator knerja jumlah kajian/ penelitian yang mendukung pengembangan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) 28
III.1.8 Indikator kinerja jumlah hasil penelitian yang mendukung kepentingan Indonesia di forum TBT WTO 29

III.1.9 Indikator kinerja persentase rekomendasi hasil kerjasama standardisasi yang mendukung pengembangan SNI 31
III.1.10 Indikator kinerja Persentase penanganan permintaan notifikasi dan *inquiry* dalam rangka memenuhi perjanjian TBT-WTO 36
III.1.11 Indikator kinerja Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Deputi PKS yang meningkat kompetensinya 37
III.1.12 Indikator kinerja realisasi anggaran Deputi PKS 38
III.1.13 Indikator kinerja Jumlah *e-governance* yang mendukung tata kelola Deputi PKS 38
BAB IV PENUTUP 40
LAMPIRAN A 42
LAMPIRAN B 44
LAMPIRAN C 45

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Komposisi sumber daya Deputi PKS tahun 2016 6
Tabel 2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Deputi PKS 2015-2019 14
Tabel 3 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Deputi PKS Tahun 2016 21
Tabel 4 Indikator kinerja pertumbuhan kontribusi SPK terhadap ekspor produk unggulan nasional 23
Tabel 5 Indikator kinerja persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan 24
Tabel 6 Indikator kinerja jumlah SNI yang difasilitasi pengembangannya 25
Tabel 7 Distribusi fasilitasi perumusan SNI adopsi SI 25
Tabel 8 Indikator kinerja jumlah SNI yang difasilitasi pengembangannya 26
Tabel 9 Indikator kinerja persentase hasil penelitian yang mendukung pengembangan standardisasi 26
Tabel 10 Indikator Kinerja Jumlah Kajian Penelitian yang Mendukung Penilaian Kesesuaian 28
Tabel 11 Indikator Kinerja Jumlah Kajian / Penelitian yang Mendukung Pengembangan SNSU 29
Tabel 12 Indikator Kinerja Jumlah Hasil Penelitian yang Mendukung Kepentingan Indonesia 30
Tabel 13 Indikator kinerja persentase rekomendasi hasil kerjasama standardisasi yang mendukung pengembangan SNI 31
Tabel 14 Indikator kinerja persentase penanganan permintaan notifikasi dan *inquiry* dalam rangka memenuhi perjanjian TBT WTO 36
Tabel 15 Penanganan *outgoing* notifikasi dan *enquiry* pada subbidang notifikasi pusat kerjasama standardisasi BSN 36
Tabel 16 Indikator kinerja persentase ASN Deputi PKS yang meningkat kompetensinya 37
Tabel 17 Indikator Kinerja Realisasi Anggaran Deputi PKS 38
Tabel 18 Indikator Kinerja Realisasi Anggaran Deputi PKS 38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur organisasi Deputi PKS 2
Gambar 2. Proses Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dalam UU/20 2014 10

PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang hanya atas rahmat yang diberikanNya kepada kami beserta seluruh staf di lingkungan Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi (Deputi PKS), sehingga pencapaian kinerja unit kerja Deputi PKS tahun 2016 dan penyusunan laporan ini dapat terwujud dengan baik.

Laporan ini disusun dalam rangka untuk memenuhi tuntutan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999. Selain itu laporan ini disusun oleh Deputi PKS sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait, khususnya kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang merupakan instansi induk dari Deputi PKS.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan Deputi PKS sepanjang tahun 2016 pada umumnya, dan dalam penyusunan laporan ini, masih belum seluruhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana yang diinginkan oleh banyak pihak. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan perbaikan dan kritik yang membangun untuk tercapainya hasil yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi para stakeholder di waktu-waktu yang akan datang.

Akhirnya, besar harapan kami bahwa laporan ini akan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi para pembaca dan pengguna dokumen ini.

Jakarta, Februari 2017
Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi - BSN

Ir. I Nyoman Supriyatna, M.Sc
NIP.195810011985031000

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Kondisi Umum

Secara struktural Deputi PKS mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang perumusan standar, penelitian dan pengembangan serta kerjasama di bidang standardisasi.

Deputi PKS yang merupakan salah satu dari 3 (tiga) Kedeputian yang ada di lingkungan BSN, membawahi tiga unit kerja yaitu:

1. Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi,
2. Pusat Perumusan Standar, dan
3. Pusat Kerjasama Standardisasi.

Dalam melaksanakan tugas di atas, Deputi PKS mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan, perumusan dan penetapan standar nasional serta kerjasama di bidang standardisasi;

b. penyusunan rencana dan program nasional di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan, perumusan dan penetapan standar nasional serta kerjasama di bidang standardisasi;

c. pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan serta pengendalian kegiatan di bidang penelitian, pengkajian, dan kerjasama di bidang standardisasi, serta pengembangan, perumusan dan penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI);

d. pembinaan dan penyelenggaraan kerjasama dalam negeri dan luar negeri di bidang standardisasi dengan badan-badan nasional dan internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam organisasi BSN, Deputi PKS berperan sebagai pilar utama dalam pelaksanaan program pengembangan standar, dimana tugas dan tanggung jawab teknisnya dilaksanakan oleh Pusat Perumusan Standar, serta didukung oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi dan Pusat Kerjasama Standardisasi.

Fungsi unit kerja yang ada di lingkungan Deputi PKS mengarah pada kebijakan pengembangan standar nasional yang didukung dengan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan standardisasi serta pelaksanaan berbagai kerjasama di bidang standardisasi, baik lingkup nasional maupun internasional. Menurut UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, standar nasional yang

dikembangkan Indonesia dikenal dengan nama Standar Nasional Indonesia (SNI), dan dinyatakan sebagai satu-satunya standar yang berlaku di seluruh Indonesia. Struktur organisasi Deputi PKS disajikan pada Gambar 1.

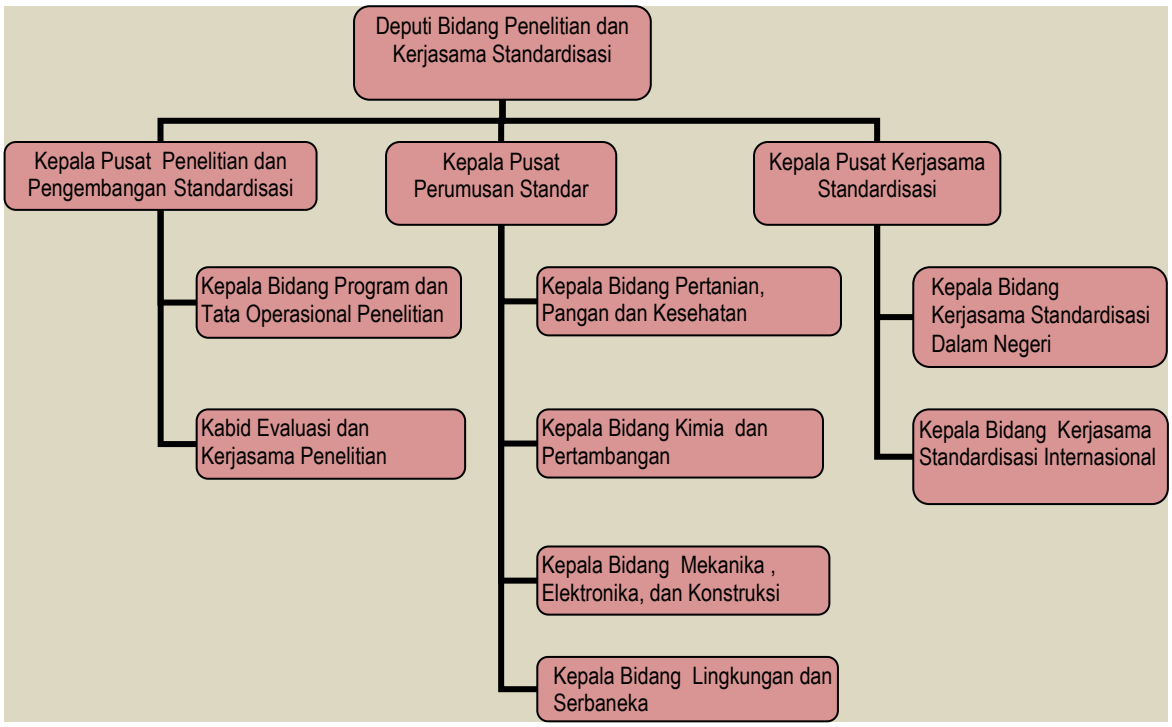

Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi PKS

Sebagai salah satu unit kerja dari Deputi PKS, Pusat Perumusan Standar (PPS) mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin bahwa dalam pengembangan SNI, seluruh Komite Teknis/Sub Komite Teknis dan para pemangku kepentingan yang terkait senantiasa taat asas dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) yang pemberlakuannya ditetapkan melalui Peraturan Kepala (Perka) BSN. Komite Teknis adalah suatu komite yang beranggotakan wakil-wakil para pemangku kepentingan yang kompeten yang tugasnya melaksanakan perumusan SNI sesuai dengan lingkup keahliannya.

Untuk melaksanakan kegiatan perumusan SNI, digunakan beberapa PSN antara lain sebagai berikut:

a. Peraturan Kepala (Perka) BSN Nomor 8 tahun 2015 tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia, yang menguraikan tentang tata cara pengembangan SNI, meliputi tata cara perumusan SNI mulai dari pengusulan Program Nasional Perumusan SNI (PNPS), pelaksanaan rapat teknis dan rapat konsensus Komtek/SubKomtek, jajak pendapat, penetapan dan publikasi, serta tata cara kaji ulang dalam rangka pemeliharaan SNI.

b. PSN 02:2007 Pengelolaan PT Perumusan SNI, yang menguraikan tentang kelembagaan Manajemen Teknis Pengembangan Standar (MTPS), pembentukan dan pembubaran Komtek/SubKomtek, tugas/tanggung jawab dan pengorganisasian Komtek/SubKomtek, dan pengelolaan sekretariat Komtek/ SubKomtek perumusan SNI.

c. PSN 03.1:2007 Adopsi standar internasional dan publikasi internasional lainnya - Bagian 1 : adopsi standar internasional menjadi SNI, yang menguraikan tentang tata cara adopsi standar internasional, apa yang boleh / tidak boleh berubah dalam adopsi identik atau modifikasi, klasifikasi standar sebagai identik / modifikasi / tidak ekivalen (IDT/MOD/NEQ).

d. PSN 03.2:2014 Adopsi standar internasional dan publikasi internasional lainnya - Bagian 2: adopsi non standar internasional menjadi SNI, yang menguraikan tentang tatacara adopsi publikasi internasional non standar, apa yang boleh / tidak boleh berubah dalam adopsi identik atau modifikasi, jenis publikasi internasional non standar yang dapat diadopsi menjadi SNI.

e. PSN 04:2006 Jajak pendapat dan pemungutan suara dalam rangka perumusan SNI, yang menguraikan tentang prosedur, tata cara pelaksanaan jajak pendapat dan pemungutan suara, cara perhitungan serta sarana pendukung yang diperlukan.

f. PSN 05:2006 Tenaga ahli standardisasi untuk pengendali mutu perumusan SNI yang, menguraikan tentang pengelolaan tenaga ahli pengendali mutu perumusan SNI (TAS QC) dalam mendukung perumusan SNI yang taat asas dan ketentuan; kriteria, tugas dan kewajiban TAS-QC.

g. Perka BSN nomor 9 tahun 2015 tentang Tata cara penomoran Standar Nasional Indonesia dan Dokumen Teknis (DT), yang menguraikan tata cara pemberian nomor sejak RSNI sampai ditetapkan menjadi SNI, namun tidak termasuk penomoran PSN.

h. PSN 07:2012 Standardisasi dan kegiatan yang terkait – Istilah umum, yang menguraikan istilah di bidang standardisasi dan kegiatan yang terkait agar terdapat kesamaan pengertian dan konsistensi penggunaan dalam perumusan SNI.

i. Perka BSN Nomor 4 tahun 2016 tentang Penulisan SNI, yang menguraikan tentang tata cara penulisan SNI, struktur standar, mulai dari halaman sampul hingga halaman akhir, bagian dari struktur standar yang sifatnya wajib ada dalam penulisan rancangan SNI dan yang sifatnya opsional, sesuai kebutuhan.

Deputi PKS melalui Pusat Perumusan Standar (PPS) bertanggung jawab dalam pengorganisasian, pengelolaan dan pembinaan terhadap seluruh sumber daya yang terlibat dalam pengembangan SNI, mulai dari seluruh staf yang ada di lingkungan PPS, konseptor Rancangan SNI (RSNI), editor RSNI, tenaga ahli pengendali mutu perumusan SNI, hingga sekretariat pengelolaan Komtek/SubKomtek perumusan SNI yang ada di berbagai Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/LPNK). Oleh karena itu penguatan koordinasi dan sinergi dengan K/LPNK menjadi kunci keberhasilan pencapaian kinerja program perumusan SNI.

Dengan demikian tersusunnya SNI yang berkualitas dan sesuai kebutuhan para pemangku kepentingan serta selaras dengan rencana strategis BSN perlu ditunjang dengan program kerja dan pencapaian kinerja yang baik dari Deputi PKS selaku unit kerja yang mempunyai tanggung jawab dalam mengkoordinasikan kegiatan perumusan SNI. Oleh karena itu, Deputi PKS mempunyai posisi strategis dalam mendukung pencapaian kinerja kelembagaan BSN secara keseluruhan.

Untuk menghasilkan SNI yang berkualitas, di dalam pengembangan SNI juga memerlukan dukungan kegiatan di bidang kerjasama standardisasi. Kerjasama standardisasi dikoordinasikan oleh Pusat Kerjasama Standardisasi yang merupakan salah satu unit di Deputi PKS. Kerjasama ini dilakukan baik dalam lingkup nasional, bilateral, regional dan internasional. Kerjasama merupakan salah satu unsur pendukung yang berperan dalam pengembangan standardisasi, terutama ketika melakukan harmonisasi standar nasional dengan standar internasional.

Di tingkat nasional, kerjasama dilakukan dengan instansi teknis terkait, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia industri, dan konsumen dengan penekanan kepada penguatan aspek kesadaran akan pentingnya standar bagi peningkatan nilai tambah produk industri dan perlindungan keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup bagi masyarakat luas selaku konsumen. Penggunaan produk bertanda SNI secara konsisten baik oleh dunia industri maupun masyarakat luas pada akhirnya akan mendukung perekonomian nasional dan memperkuat daya saing produk di era kompetisi perekonomian global yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup bangsa.

Kerjasama internasional di bidang standardisasi meliputi kerjasama dengan forum pengembang standar dan forum kerjasama ekonomi global. Peran aktif dalam forum pengembang standar meliputi ISO (*International Organization for Standardization*), IEC (*International Electrotechnical Commission*), dan CAC (*Codex Alimentarius Commission)*. Partisipasi dalam forum ini ditujukan untuk mendukung pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) agar selaras dengan standar internasional serta merupakan upaya memperjuangkan kepentingan nasional maupun kepentingan sesama negara

berkembang. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip perumusan standar internasional yaitu keterwakilan semua negara anggota sesuai dengan tingkat perkembangannya.

Kerjasama ekonomi global melalui kerjasama perdagangan meliputi fora bilateral, regional dan multilateral. Kerjasama bilateral dimaksudkan untuk memfasilitasi kepentingan perdagangan ekonomi nasional dengan negara mitra. Dalam hal ini, kerjasama bilateral dilakukan dalam bentuk kerjasama antara dua negara, yaitu Indonesia dengan negara mitra, dimana BSN berpartisipasi sebagai bagian dalam kerjasama kedua negara tersebut. Dukungan BSN adalah melakukan kerjasama untuk merundingkan hal-hal yang berkaitan dengan standardisasi dan penilaian kesesuaian dengan badan standardisasi nasional di negara lain atau antara BSN dengan organisasi pengembang standar di negara lain.

Dalam konteks kerjasama regional, perjuangan kepentingan Indonesia dilakukan dalam forum ASEAN dan APEC. Selain itu juga forum standardisasi dan akreditasi regional dan internasional seperti PASC (*Pacific Area Standard Congress*), PAC (*Pacific Accreditation Cooperation*), APLAC (*Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation*), IAF (*International Accreditation Forum*), ILAC (*International Laboratory Accreditation Cooperation*) serta WTO (*World Trade Organization*) sebagai Organisasi Perdagangan Dunia.

Dalam kerjasama multilateral, UU No.7/1994 tentang ratifikasi keanggotaan Indonesia dalam WTO membawa konsekuensi bahwa Indonesia berkewajiban untuk mematuhi seluruh Perjanjian WTO dimana yang terkait dengan standardisasi adalah Perjanjian *Agreement on Technical Barrier to Trade* (TBT) atau hambatan teknis perdagangan. Dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa setiap negara mempunyai hak untuk mengatur perdagangan produk dengan menerapkan peraturan teknis, standar, dan prosedur penilaian kesesuaian dengan syarat tidak menimbulkan hambatan perdagangan yang tidak diperlukan. Untuk menghindari hambatan teknis perdagangan maka pengembangan standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian yang diberlakukan oleh anggota WTO harus mematuhi prinsip transparansi (melalui notifikasi), non diskriminasi, ekuivalensi, dan harmonisasi serta mengacu kepada standar dan pedoman yang dikembangkan oleh organisasi internasional yang relevan serta organisasi perumus standar internasional yang diakui dan direkomendasikan oleh WTO, yaitu antara lain adalah ISO, IEC, CAC, dan ITU (*International Telecommunication Union*).

Selain dukungan kegiatan kerjasama, Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi (Puslitbang) BSN sebagai salah satu unit kerja di Deputi PKS sangat penting keberadaannya dalam memberikan kontribusi untuk pengembangan standardisasi, penilaian kesesuaian dan SNSU di tingkat nasional dan internasional, serta

memberikan dukungan mendukung kepentingan Indonesia di forum TBT WTO dan forum internasional lainnya di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian. Selain itu Puslitbang juga diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan standar baru sesuai kebutuhan pasar.

Untuk melaksanakan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut di atas, diperlukan sumber daya manusia yang cukup baik dari sisi jumlah maupun kompetensinya. Kondisi sumber daya manusia pada Deputi PKS saat ini disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Komposisi Sumber Daya Deputi PKS Tahun 2016

No		Deputi	PPS	PKS	Puslitbang	Total
1	Jenis Kelamin					
	Laki-Laki	1	25	15	16	57
	Perempuan	-	20	10	8	38
	Jumlah	1	45	25	24	95
2	Pendidikan					
	SLTA	-	-	-	-	-
	D3	-	2	3	-	5
	S1	-	35	18	15	68
	S2	1	7	4	9	21
	S3	-	1	-	-	1
	Jumlah	1	45	25	24	95

I.2. Isu - Isu Strategis yang Dihadapi

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, penyediaan Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan harus menjadi prioritas utama. Penyediaan SNI tersebut harus selaras dengan tujuan utama standardisasi di Indonesia untuk periode 2016-2019 yaitu: 1) Melindungi kepentingan publik dan lingkungan, 2) Meningkatkan kepercayaan atas produk nasional di pasar domestik, dan 3) Membuka akses produk domestik ke pasar global.

Oleh karena itu SNI harus tersedia sesuai dengan kebutuhan pasar atau kebutuhan para pemangku kepentingan dan harus mampu menjadi *tool* untuk dapat melindungi masyarakat Indonesia terkait aspek keamanan, kesehatan, keselamatan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup (K3L) serta untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia. Hal tersebut telah menjadi cita-cita BSN sebagai lembaga standardisasi. Keberadaan Deputi PKS menjadi sangat penting sebagai pilar utama dalam menyusun kebijakan untuk mewujudkan ketersediaan SNI yang sesuai kebutuhan para pemangku

kepentingan serta dapat memberikan maanfaat kepada para pelaku usaha yang menerapkan sehingga tingkat kinerja Deputi PKS akan mempengaruhi maju tidaknya perkembangan standardisasi, khususnya terkait dengan penerapan SNI di Indonesia.

Dalam upaya mewujudkan tujuan utama standardisasi yaitu melindungi masyarakat terkait dengan kesehatan, keselamatan, keamanan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka harus tersedia SNI yang diperlukan dalam pencapaian tujuan tersebut melalui pemberlakuan secara wajib di dalam regulasi teknis. Oleh karena itu di dalam program pengembangan SNI secara nasional, kebutuhan-kebutuhan SNI yang diperlukan untuk penyusunan regulasi teknis oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian menjadi salah satu prioritas kegiatan Deputi PKS.

Seiring dengan kesepakatan perwujudan *ASEAN Economic Community* (AEC) 2016, peran standardisasi menjadi sangat strategis. Seluruh negara ASEAN telah menyepakati integrasi perdagangan untuk 12 sektor prioritas, dimana 6 sektor diantaranya memerlukan tersedianya standar yang harmonis. Keenam sektor tersebut adalah produk otomotif, produk berbasis kayu, produk berbasis karet, produk elektronika dan kelistrikan, produk makanan siap saji dan produk perawatan kesehatan (obat, obat tradisional, kosmetik dan alat kesehatan). Dari keenam sektor tersebut disepakati untuk mengharmonisasikan 256 standar nasional masing-masing negara anggota ASEAN. Oleh karena itu harmonisasi standar di ASEAN ini menjadi salah satu tantangan utama Deputi PKS yang harus diselesaikan sampai dengan akhir tahun 2016.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pengembangan SNI sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan yang didukung dengan kegiatan penelitian dan kerjasama standardisasi, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain:

Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI sesuai dengan kebutuhan untuk melindungi kepentingan publik dan kelestarian lingkungan hidup, serta SNI yang berisi persyaratan karakteristik produk yang lebih disukai oleh konsumen pasar domestik untuk kemudian diterapkan secara sukarela oleh pelaku usaha dan mendukung daya saing bangsa. SNI dapat dinyatakan efektif bila SNI yang telah ditetapkan kemudian diterapkan secara sukarela atau diberlakukan secara wajib sesuai dengan tujuan penetapan SNI tersebut. Oleh karena itu diperlukan sistem perencanaan dan perumusan SNI yang secara efektif mampu mengantisipasi kebutuhan SNI untuk berbagai kepentingan nasional dan berbagai pihak.

Penelitian di bidang standardisasi secara terus menerus diupayakan agar dapat mendukung proses pengembangan SNI, baik dilakukan secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak lain. Saat ini jumlah dan kepakaran peneliti di BSN masih

terbatas, sehingga masih perlu ditingkatkan secara terus menerus agar tidak menjadi hambatan dalam melakukan penelitian yang mendukung pengembangan SPK. Di samping itu fokus penelitian yang dilakukan telah mulai diarahkan sejalan dengan produk atau sektor yang menjadi prioritas BSN, yaitu sektor pariwisata dan kemaritiman. Kendala juga masih dialami dalam upaya mempublikasikan hasil-hasil penelitian di jurnal internasional. Oleh karena itu diperlukan strategi khusus di bidang penelitian standardisasi agar dapat optimal mendukung pengembangan SPK.

Dalam hal kerjasama standardisasi, terutama kerjasama internasional, seringkali tidak mudah untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum-forum kerjasama internasional yang terkait standardisasi dan penilaian kesesuaian. Hal utama yang menjadi kendala adalah lemahnya kertas posisi Indonesia dalam sidang-sidang internasional yang dikarenakan dukungan data ilmiah yang masih sangat minim. Oleh karena itu dukungan hasil-hasil penelitian dan kajian sangat diperlukan untuk memperbaiki kertas posisi Indonesia dalam pembahasan persetujuan-persetujuan di forum internasional, terutama untuk persetujuan yang sifatnya mengikat pemerintah Indonesia.

I.3. Sistematika dan Ruang Lingkup Laporan

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus didukung oleh unsur akuntabilitas yang baik pula. Sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Deputi PKS menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 sebagai perwujudan kewajiban Deputi PKS dalam mempertanggungjawabkan capaian tingkat kinerja pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Deputi PKS di tahun yang akan datang kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait.

Maksud penyusunan LAKIP Deputi PKS adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Deputi PKS. Sedangkan tujuan penyusunan LAKIP Deputi PKS adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Deputi PKS. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, diharapkan adanya rekomendasi sebagai masukan untuk menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Deputi PKS khususnya dan BSN pada umumnya.

LAKIP Deputi PKS 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Ringkasan Eksekutif, secara integratif memberikan gambaran singkat tentang seluruh isi laporan
- Daftar Isi
- Daftar Tabel
- Daftar Gambar
- Pengantar, memuat dasar hukum kewajiban pembuatan laporan kinerja, menguraikan tentang kegiatan yang dikerjakan oleh Deputi PKS sepanjang tahun 2016, dan pengantar terhadap keseluruhan isi laporan
- Bab I - Pendahuluan, menyajikan tentang penjelasan umum organisasi Deputi PKS, meliputi tugas pokok dan fungsi, kewenangan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki, serta permasalahan utama yang dihadapi dalam menjalankan organisasi.
- Bab II - Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan tentang Rencana Strategis Deputi PKS Tahun 2015-2019 dan Penetapan Kinerja Deputi PKS Tahun 2016
- Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan secara menyeluruh pencapaian kinerja Deputi PKS tahun 2016 beserta analisisnya dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, serta menjelaskan tentang evaluasi pencapaian rencana sasaran strategis tahun 2015-2019. Selain itu menjelaskan tentang analisis efisiensi pemanfaatan sumber daya, analisis program/ kegiatan serta analisis realisasi anggaran.
- Bab IV - Penutup, menguraikan simpulan umum atas laporan kinerja Deputi PKS tahun 2016 dan rekomendasi bagi perbaikan kinerja pada masa datang.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

II.1 Umum

Saat ini pengaturan mengenai standardisasi dan penilaian kesesuaian serta ketertelusuran pengukuran yang dilakukan dalam mendukung kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian dituangkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Secara institusional, BSN memegang peranan yang sangat penting dalam mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia.

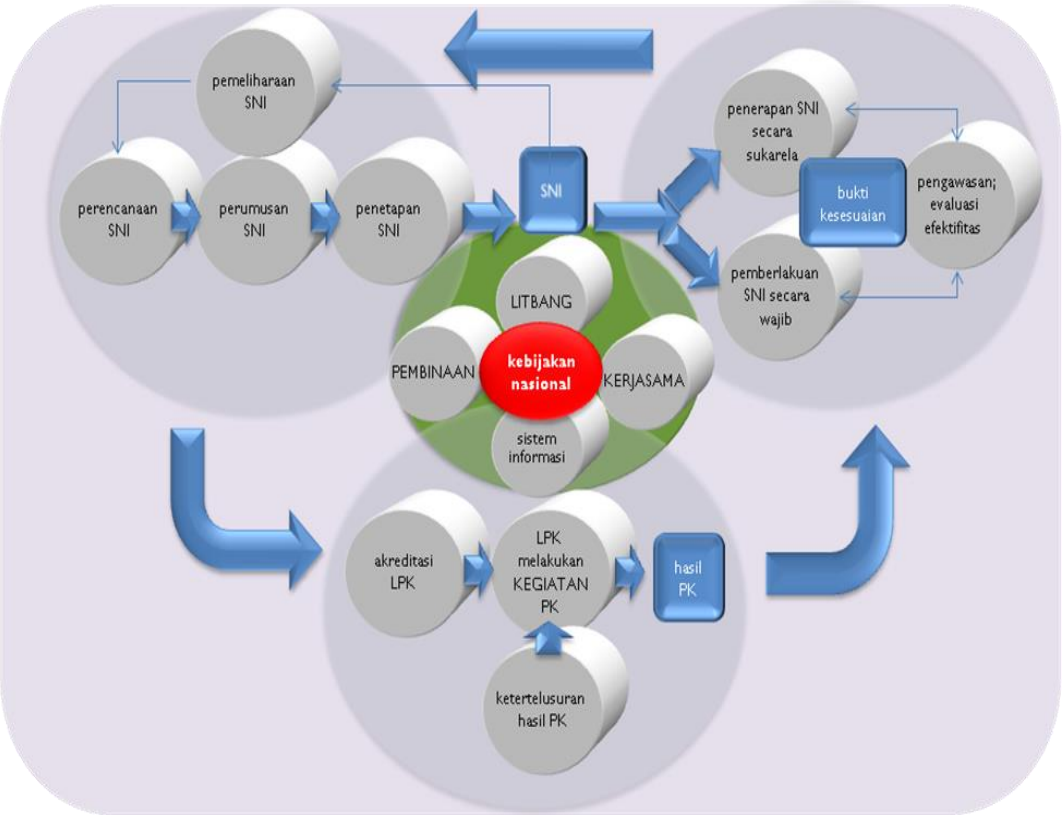

Gambar 2. Proses Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dalam UU/20 2014

Berdasarkan UU 20 tahun 2014, Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bertujuan untuk tiga hal yang utama, yaitu:

a. meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;

b. meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan

c. meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan barang dan/atau jasa di dalam negeri dan luar negeri.

Secara umum UU Nomor 20 Tahun 2014 mengatur 4 hal yang utama. Pertama adalah berkaitan dengan sistem pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI). Elemen ini mengatur bagaimana SNI direncanakan perumusannya, kemudian dilakukan prumusan oleh Komite Teknis dan pada akhirnya ditetapkan menjadi SNI oleh BSN. Sesuai dengan norma yang ada, SNI akan dikaji ulang paling lambat setiap 5 tahun sekali untuk memastikan validitas dan kekinian SNI.

Bagian kedua adalah hal-hal yang berkaitan dengan penerapan SNI seperti lazimnya sebuah standar, maka sifat penerapan SNI adalah sukarela dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk yang telah menerapkan SNI. Walaupun demikian, untuk hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, keamanan, keselamatan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, SNI dapat diberlakukan secara wajib. Artinya ketika suatu SNI diwajibkan pemberlakuannya maka seluruh produk yang diedarkan atau diperdagangkan di Indonesia harus memenuhi persyaratan seperti yang tercantum dalam SNI tersebut.

Setelah SNI diterapkan, baik secara sukarela maupun wajib, maka diperlukan kegiatan pembuktian bahwa penerapannya sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam SNI. Untuk itu diperlukan kegiatan penilaian kesesuaian yang terdiri dari pengujian laboratorium, sertifikasi maupun inspeksi. Untuk memastikan kompetensi lembaga yang melakukan penilaian kesesuaian, maka diperlukan proses akreditasi terhadap lembaga-lembaga tersebut. Proses akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang pada intinya proses pemberian pengakuan formal bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan kompetensi sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK).

Keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan standardisasi dan penilaian kesesuaian didukung dengan beberapa elemen yang sifatnya horisontal yang mencakup kegiatan pembinaan, kerjasama, penelitian dan pengembangan dan lain-lain. Pada akhirnya semua komponen standardisasi dan penilaian kesesuaian dikoordinasikan melalui kebijakan nasional di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Dalam konteks implementasi UU Nomor 20 Tahun 2014 tersebut, Deputi PKS memegang peranan kunci dalam pelaksanaan pengembangan SNI. Pengembangan SNI dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal yang utama, diantaranya adalah

berkaitan dengan perlindungan konsumen, kemampuan industri dalam negeri, kearifan lokal, dan lain-lain.

II.2. Rencana Strategis 2015-2019

Dalam menyusun rencana strategis Deputi PKS 2015-2019, acuan yang digunakan adalah Rencana Strategis BSN yang menetapkan Visi tahun 2015-2019 yaitu:

"Terwujudnya infrastruktur mutu nasional yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa"

Dengan Infrastruktur mutu nasional yang handal, yang mencakup standardisasi, penilaian kesesuaian (pengujian, inspeksi, sertifikasi, dan akreditasi), pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU), kalibrasi dan penyediaan bahan acuan bersertifikat, diharapkan akan memberikan kemampuan untuk melindungi pasar dalam negeri dan kemampuan untuk melakukan penetrasi ke pasar global, dan secara bersamaan mampu memberi perlindungan kepada masyarakat dalam hal kesehatan, keselamatan, keamanan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Untuk mewujudkan Visi BSN tersebut di atas serta menyelaraskan dengan salah satu misi pembangunan nasional, diperlukan tindakan nyata sesuai dengan tugas dan fungsi BSN sebagai berikut:

Merumuskan, menetapkan, dan memelihara Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan.

a. Mengembangkan dan mengelola Sistem Penerapan Standar, Penilaian Kesesuaian, dan Ketertelusuran Pengukuran yang handal untuk mendukung implementasi kebijakan nasional di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
b. Mengembangkan budaya, kompetensi, dan sistem informasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas implementasi sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
c. Merumuskan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Nasional, Sistem dan Pedoman di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang efektif untuk mendukung daya saing dan kualitas hidup bangsa.

Rencana Strategis Deputi PKS 2015-2019 disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis BSN 2015-2019 sebagaimana pada Lampiran A.

II.3. Visi

Untuk memanfaatkan potensi dan menjawab permasalahan standardisasi di bidang pengembangan SNI, Visi Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama selama periode 2015-2019 adalah:

"Terwujudnya SNI yang Berkualitas dan Bermanfaat Bagi Pemangku Kepentingan"

II.4. Misi

Sejalan dengan visi tersebut di atas, maka misi Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi adalah memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan kegiatan pengembangan standar yang didukung oleh penelitian dan kerjasama untuk mendukung terwujudnya tujuan standardisasi di Indonesia, yaitu:

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan
2. Melaksanakan penelitian standardisasi sesuai dengan kebijakan pengembangan dan penerapan SNI dan penilaian kesesuaian
3. Meningkatkan kerjasama nasional, bilateral, regional dan internasional di bidang standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian

II.5. Tujuan

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan BSN yang diantaranya adalah menjamin digunakannya infrastuktur mutu yang handal dan memastikan terakomodasinya kepentingan Indonesia di forum TBT WTO, maka sesuai dengan visi, misi, tugas pokok, dan fungsi Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan
2. Mewujudkan kerjasama internasional bidang standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian dalam rangka memfasilitasi kepentingan Indonesia di forum perdagangan global
3. Memastikan terakomodasinya kepentingan Indonesia di forum TBT WTO
4. Meningkatkan kajian/penelitian di bidang standardisasi

II.6. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi menentukan sasaran strategis dan indikator kinerja utama seperti pada Tabel 2.

Tabel 2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Deputi PKS

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1	Meningkatnya daya saing produk berstandar	1	Pertumbuhan kontribusi SPK terhadap ekspor produk unggulan nasional
2	Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan	2	Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan
		3	Jumlah SNI yang difasilitasi pengembangannya
3	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI	4	Jumlah SNI* yang siap ditetapkan
4	Meningkatnya kualitas penelitian bidang SPK	5	Persentase hasil penelitian yang mendukung pengembangan standardisasi**
		6	Jumlah kajian/ penelitian yang mendukung penilaian kesesuaian
		7	Jumlah kajian/ penelitian yang mendukung pengembangan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)
		8	Jumlah hasil penelitian yang mendukung kepentingan Indonesia di forum TBT WTO
5	Meningkatnya kualitas kerjasama bidang SPK	9	Persentase rekomendasi hasil keriasama standardisasi yang mendukung pengembangan SNI
		10	Persentase penanganan permintaan notifikasi dan inquiry dalam rangka memenuhi perjanjian TBT WTO
6	Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi Deputi PKS yang profesional	11	Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Deputi PKS yang meningkat kompetensinya
		12	Realisasi anggaran Deputi PKS
		13	Jumlah *e-governance* yang mendukung tata kelola Deputi PKS

Keterangan : * Target RASNI diubah menjadi target SNI
** Pengembangan SNI diganti menjadi pengembangan standardisasi

II.7. Kebijakan Deputi PKS

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, pada dasarnya arah kebijakan Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi dapat dikelompokkan ke dalam 5 (lima) arah kebijakan yaitu:

1. Menyediakan SNI yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan
2. Mengembangkan SNI yang selaras dengan standar internasional dengan tetap mempertimbangkan kepentingan Indonesia
3. Meningkatkan posisi Indonesia di forum bilateral, regional, dan internasional di bidang standardisasi
4. Meningkatkan posisi Indonesia di forum TBT WTO
5. Meningkatkan kualitas dan cakupan hasil penelitian di bidang pengembangan standardisasi

II.7.1 Strategi Deputi PKS dalam Mengimplementasikan Kebijakan Kedeputian

Kebijakan 1: Menyediakan SNI yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan

Upaya untuk memastikan tersedianya SNI yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan perlu dilakukan untuk mendukung terwujudnya infrastruktur mutu yang handal secara nasional. Proses perumusan SNI harus didukung dengan acuan, metode dan informasi mengenai pihak-pihak yang akan menerapkan yang diperoleh dari kegiatan penelitian dan kerjasama dengan berbagai pihak. Sehingga selain berkualitas, SNI juga akan diterapkan dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan.

Oleh karena itu perumusan standar difokuskan dengan kegiatan antara lain : (1) peningkatan mutu dan kualitas SNI melalui penguatan sistem pengembangan SNI dan (2) perumusan SNI yang difokuskan pada persyaratan yang diperlukan untuk memastikan perlindungan kepentingan publik dan lingkungan, pemenuhan terhadap kesepakatan harmonisasi di tingkat ASEAN, persyaratan minimal bagi produk terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan persyaratan yang memuat nilai tambah bagi produk nasional sesuai kebutuhan dan karakteristik bangsa Indonesia, serta mampu memperoleh kepercayaan di pasar domestik.

Kebijakan 2: Mengembangkan SNI yang selaras dengan standar internasional dengan tetap mempertimbangkan kepentingan Indonesia

Kepentingan Indonesia dalam penyusunan standar internasional, baik di ISO maupun di IEC harus ditingkatkan. Penanganan Indonesia terhadap kegiatan di *Technical Committee* (TC) ISO dan IEC diprioritaskan pada TC yang menangani produk-produk yang potensial bagi Indonesia. Di samping itu harmonisasi standar nasional tingkat kerjasama ASEAN juga menjadi salah satu fokus utama pengembangan SNI.

Secara umum perumusan SNI diupayakan harmonis dengan standar internasional, tetapi dalam hal-hal tertentu, terutama untuk kepentingan nasional, SNI dirumuskan tidak sepenuhnya selaras dengan standar internasional. Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan kegiatan perumusan SNI dengan memperhatikan standar internasional sebagai referensi dan memperhatikan karakter lingkungan, iklim, budaya dan kemampuan iptek Indonesia.

Kebijakan 3: Meningkatkan posisi Indonesia di forum bilateral, regional, dan internasional di bidang standardisasi

Dalam setiap forum kerjasama standardisasi, baik bilateral, regional maupun internasional, posisi (kepentingan) nasional sangat penting untuk diperjuangkan. Di forum ASEAN, dengan pembentukan *ASEAN Economic Community* (AEC), sebagai negara dengan sumber daya manusia terbanyak dan sumber daya alam terkaya, Indonesia harus bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya dari forum kerjasama tersebut. Demikian juga di forum *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) dan forum internasional lainnya yang terkait standardisasi, Indonesia harus dapat mengambil peran aktif dalam setiap pembahasan persetujuan-persetujuan yang akan diberlakukan dengan memperjuangkan kepentingan Indoensia.

Kerjasama standardisasi tersebut dilaksanakan dengan fokus kegiatan antara lain untuk (1) peningkatan kerjasama standardisasi di tingkat bilateral, regional dan internasional serta pemanfaatannya untuk memperjuangkan kepentingan bangsa Indonesia di tingkat regional dan internasional tersebut dan (2) membangun kerjasama di tingkat nasional untuk membuka akses ke pasar global.

Kebijakan 4: Meningkatkan posisi Indonesia di forum TBT WTO

BSN menjadi penanggungjawab (*focal point*) untuk perundingan yang berhubungan dengan hambatan teknis perdagangan (*Technical Barrier to Trade* / TBT) yang sekarang lebih dikenal dengan standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian (*Standard, Technical Regulation and Conformity Assessment Procedure* / STRACAP). Dalam perjanjian TBT WTO, BSN bertanggung jawab sebagai *national notification body dan enquiry point*. BSN berkewajiban untuk menotifikasikan ke sekretariat TBT WTO atas rancangan regulasi teknis yang berpotensi menimbulkan hambatan perdagangan antar negara. BSN juga berkewajiban menyuarakan kepentingan Indonesia atas regulasi teknis negara lain yang berpotensi menghambat produk andalan ekspor Indonesia.

Untuk itu dilaksanakan kegiatan penguatan posisi Indonesia di TBT WTO dengan prioritas meningkatkan keaktifan di sidang-sidang TBT WTO dan memperkuat posisi

kepentingan Indonesia yang didukung dengan data-data ilmiah yang diperlukan, antara lain diperoleh melalui penelitian.

Kebijakan 5: Meningkatkan kualitas dan cakupan hasil penelitian di bidang pengembangan standardisasi

Penelitian dan pengembangan di bidang standardisasi sangat penting perannya dalam menyiapkan penyusunan kebijakan nasional terkait standardisasi. Data atau informasi yang akurat sangat diperlukan untuk hal yang terkait dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Penelitian perlu ditekankan pada penelitian pra dan pasca implementasi kebijakan pengembangan dan penerapan SNI.

Oleh karena itu penelitian dan pengembangan standardisasi difokuskan pada kegiatan antara lain: (1) penelitian untuk mendukung pengembangan standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK) di tingkat nasional dan internasional; serta (2) penelitian untuk mendukung semua tugas dan fungsi Unit Kerja BSN, termasuk kebutuhan penelitian untuk penyusunan perencanaan strategis.

II.7.2 Program dan Kegiatan Deputi PKS Tahun 2016

Progam dan kegiatan di Deputi PKS 2016 terdistribusi di tiga unit eselon II yang ada di bawahnya, yaitu Pusat Perumusan Standar, Pusat Kerjasama Standardisasi dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi. Program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Kegiatan Perumusan Standar

Kegiatan perumusan standar dilakukan untuk memastikan tersusunnya SNI yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan dengan mendayagunakan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sumber daya lainnya. Pada tahun 2016 ditargetkan tersusunnya 500 SNI. Kegiatan perumusan standar dilakukan melalui pelaksanaan beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan pengembangan standar

   Perumusan kebijakan pengembangan standar dilaksanakan dalam rangka menyiapkan rekomendasi kepada Kepala BSN, dengan melalui beberapa kegiatan dengan tiga output utama, yaitu:

   a. Jumlah rekomendasi terkait pembentukan/ perubahan Komite Teknis perumusan SNI

b. Jumlah rekomendasi persetujuan usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) dari Komite Teknis perumusan SNI

c. Jumlah rancangan Peraturan Kepala BSN (Perka BSN) terkait pengembangan SNI

Perumusan kebijakan oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional terkait pengembangan standar dibantu oleh Manajemen Teknis Pengembangan Standar (MTPS). MTPS merupakan forum yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional dalam rangka menetapkan kebijakan dan strategi untuk memperlancar pengelolaan kegiatan pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) agar memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan.

2. Pengendalian proses perumusan SNI

Pengendalian proses perumusan SNI dilaksanakan dalam rangka menjamin proses perumusan SNI secara taat asas dan sesuai dengan Perka BSN terkait pengembangan SNI. Kegiatan ini dilaksanakan melalui empat kegiatan utama yang terdiri dari:

a. Pengendalian proses perumusan SNI

b. Pengendalian waktu penyelesaian PNPS hingga RASNI tepat waktu

c. Peningkatan jumlah Sekretariat Komtek Perumusan SNI yang dikelola oleh BSN

d. Pembinaan Sumber Daya Manusia Perumusan SNI

3. Pembinaan Sumber Daya Manusia Perumusan SNI

Pembinaan sumber daya manusia perumusan SNI dilaksanakan dalam rangka menjamin kompetensi seluruh sumber daya manusia yang terlibat dalam proses perumusan SNI untuk mendukung terwujudnya SNI yang berkualitas dan bermanfaat bagi pelaku usaha dengan semangat simpler, faster, better melalui pembinaan SDM perumusan SNI

4. Peningkatan Kinerja Komtek/SubKomtek

Peningkatan kinerja Komtek/Subkomtek dilaksanakan dalam rangka menjamin kinerja Komtek/SubKomtek sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perka BSN, melalui dua kegiatan utama.

5. Pembinaan Komtek/SubKomtek dalam rangka memenuhi ketentuan Perka BSN

Evaluasi kinerja Komtek/SubKomtek terkait pemenuhannya terhadap ketentuan Perka BSN.

6. Fasilitasi Perumusan SNI

Fasilitasi perumusan SNI dilaksanakan dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia dalam perjanjian kerjasama baik regional maupun internasional terkait standardisasi (AFTA dan MEA 2016), khususnya untuk menyelaraskan standar nasional negara anggota dengan standar internasional yang disepakati, dengan output 100 dokumen SNI, melalui kegiatan utama dalam bentuk dukungan pendanaan dalam rapat teknis dan rapat konsensus dari Komtek yang RSNI-nya termasuk prioritas harus diharmonisasikan.

Manfaat dari penyelarasan/ harmonisasi standar antara lain akan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap SNI; para pelaku usaha akan lebih mudah memasukkan produknya ke pasar internasional; meningkatkan keberterimaan produk yang bertanda SNI; memudahkan aliran produk yang bertanda SNI dari pabrik ke pasar; serta pengakuan terhadap hasil proses pengujian dan sertifikasi.

B. Kegiatan Kerjasama Standardisasi

Pada tahun 2016, rencana kinerja di bidang kerjasama standardisasi difokuskan pada memberikan rekomendasi hasil kesepakatan kerjasama baik di tingkat nasional maupun internasional yang dapat digunakan dalam mendukung pengembangan SNI. Dalam hal ini ditargetkan 75% dari rekomendasi yang dihasilkan dari berbagai kerjasama standardisasi yang dilakukan dapat mendukung pengembangan SNI dan menjadi masukan dalam program pengembangan standar secara nasional.

Dalam rangka mendukung pengembangan SNI, kegiatan kerjasama difokuskan kepada kesepakatan kerjasama standardisasi di tingkat nasional, bilateral, regional dan multilateral serta tindak lanjut dan implementasi kesepakatan kerjasama di bidang standardisasi yang harus dipenuhi. Sebagai anggota organisasi pengembang standar ISO dan IEC, kegiatan ini dilakukan dalam hal memberikan tanggapan Indonesia terhadap pengembangan standar internasional. Selain itu, kegiatan pengembangan standar dilakukan dengan mengacu kepada *Annex 3 – TBT - WTO Agreement* tentang Petunjuk Pelaksanaan Yang Baik Untuk Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar (*Code of Good Practice for the Preparation, Adoption and Application of Standards*).

Kegiatan yang dilakukan di bidang kerjasama standardisasi meliputi:

1. Kerjasama standardisasi yang disepakati di tingkat nasional, bilateral, regional dan multilateral untuk memfasilitasi perdagangan

2. Mengimplementasikan kerjasama standardisasi yang telah disepakati
3. Penguatan posisi Indonesia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN serta di Asia Pasifik
4. Menyusun tanggapan Indonesia dalam kegiatan pengembangan standar internasional
5. Penanganan pelayanan permintaan notifikasi dan enquiry dalam rangka memenuhi perjanjian TBT-WTO
6. Penguatan standardisasi dan penilaian kesesuaian melalui peningkatan peran aktif Indonesia di forum TBT-WTO

C. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Standardisasi

Kegiatan penelitian dan pengembangan standardisasi tahun 2016 difokuskan untuk menghasilkan penelitian yang bermutu untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan standardisasi, pengembangan penilaian kesesuaian dan SNSU serta mendukung kepentingan Indonesia dalam forum bilateral, regional dan internasional di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Program dan kegiatan litbang saat ini difokuskan pada kebijakan pemerintah dalam pengembangan standardisasi yaitu sebesar 75% dari seluruh fokus penelitian. Pengembangan standardisasi ini meliputi pengembangan SNI dan penerapan SNI serta penelitian juga diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan standar baru sesuai kebutuhan pemangku kepentingan. Sedangkan 25 % lainnya untuk penelitian lainnya dalam pengembangan penilaian kesesuaian dan SNSU, serta mendukung kepentingan Indonesia dalam forum internasional, dan lain-lain.

Peran penelitian dan pengembangan standardisasi menjadi penting seiring kebutuhan pengembangan standar yang mampu menjadi *tool* dalam menghadapi hambatan *Trade Barrier to Trade* (TBT) dalam perdagangan.

Kegiatan yang dilakukan di bidang penelitian dan pengembangan standardisasi menghasilkan output sebagai berikut:

1. penelitian yang mendukung pengembangan SNI
2. penelitian yang mendukung pengembangan penilaian kesesuaian
3. penelitian yang mendukung pengembangan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)

4. penelitian yang mendukung kepentingan Indonesia di forum TBT- WTO dan forum internasional lainnya.

Beberapa penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 difokuskan untuk mendukung sektor prioritas yang ditetapkan BSN yaitu sektor pariwisata dan kemaritiman.

II.7.3 Penetapan Kinerja 2016

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi (Deputi PKS) berpedoman pada perencanaan strategis yang disusun melalui pengamatan terhadap lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, dalam bentuk perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Renstra Deputi PKS 2015-2019 seperti yang telah diuraikan di atas. Implementasi perencanaan strategis tersebut dijabarkan melalui kebijakan serta program kerja yang disusun setiap tahun. Pada tahun 2016, implementasi perencanaan strategis dijabarkan dalam Penetapan Kinerja BSN yang memuat penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja Deputi PKS TA 2016. Tabel 3 menguraikan sasaran strategis serta target Deputi PKS untuk tahun 2016.

Tabel 3 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Deputi PKS Tahun 2016

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	SATUAN
STAKEHOLDER PERSPECTIVES					
1	Meningkatnya daya saing produk berstandar	1	Pertumbuhan kontribusi SPK terhadap ekspor produk unggulan nasional	5	%
CUSTOMER PERSPECTIVES					
2	Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan	2	Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan	40	%
		3	Jumlah SNI yang difasilitasi pengembangannya	100	SNI
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVES					
3	Meningkatnyakapasitas dan kualitas pengembangan SNI	4	Jumlah SNI* yang siap ditetapkan	500	SNI
4	Meningkatnya kualitas penelitian bidang SPK	5	Persentase hasil penelitian yang mendukung pengembangan standardisasi **	75	%

	6	Jumlah kajian/ penelitian yang mendukung penilaian kesesuaian	1	penelitian
	7	Jumlah kajian/ penelitian yang mendukung pengembangan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)	1	penelitian
	8	Jumlah hasil penelitian yang mendukung kepentingan Indonesia di forum TBT WTO	1	penelitian
5 Meningkatnya kualitas kerjasama bidang SPK	9	Persentase rekomendasi hasil keriasama standardisasi yang mendukung pengembangan SNI	75	%
	10	Persentase penanganan permintaan notifikasi dan inquiry dalam rangka memenuhi perjanjian TBT WTO	100	%
Learning and Growth Perspectives				
6 Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi Deputi PKS yang profesional	11	Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Deputi PKS yang meningkat kompetensinya	100	%
	12	Realisasi anggaran DePuti PKS	>95	%
	13	Jumlah *e-governance* yang mendukung tata kelola Deputi PKS	3	Aplikasi

Berdasarkan perencanaan kinerja Deputi PKS untuk mencapai 6 (enam) sasaran yang sudah ditetapkan untuk tahun 2016 diperlukan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut. Kegiatan tersebut pada dasarnya dilaksanakan oleh unit-unit eselon II yang berada di Deputi PKS, yaitu Pusat Perumusan Standar, Pusat Kerjasama Standardisasi dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi

Capaian kinerja Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi tahun 2016 diukur dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dan realisasinya. Capaian Deputi PKS terhadap target yang ditetapkan pada tahun 2016 diukur dari capaian 6 (enam) sasaran strategis dengan 13 (tigabelas) indikator kinerja yang telah ditetapkan. Ketigabelas indikator kinerja itu dibagi dalam 4 (empat) perspektif yaitu *Stakeholder perspectives, Customer Perspectives, Internal Process Perspectives* dan *Learning and Growth Perspectives*, yang merupakan akumulasi dari output yang dihasilkan oleh 3 unit di Deputi PKS yang secara komprehensif diwujudkan menjadi hasil (*semi outcome*) untuk mendukung salah satu tujuan BSN yaitu mengembangkan SNI sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan.

Capaian kinerja Deputi PKS dari segi *stakeholder perspectives*

III.1.1 Indikator kinerja pertumbuhan kontribusi SPK terhadap ekspor produk unggulan nasional

Tabel 4 Indikator kinerja pertumbuhan kontribusi SPK terhadap ekspor produk unggulan nasional

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	SATUAN
1	Meningkatnya daya saing produk berstandar	1	Pertumbuhan kontribusi SPK terhadap ekspor produk unggulan nasional	5	11,6	%

Rumus Pertumbuhan kontribusi SPK terhadap ekspor produk unggulan nasional =

$$\frac{Xn - Xn\text{-}1}{Xn\text{-}1} \times 100\%$$

Xn = Nilai ekspor tahun n (USD)

Xn-1= nilai ekspor tahun n-1 (USD)

Perhitungan Pertumbuhan ekspor produk unggulan nasional *)

$$= \frac{(Jumlah\ ekspor\ 2016 - Jumlah\ ekspor\ 2015)}{Jumlah\ ekspor\ 2015} \times 100\%$$

$$= \frac{(38.629.320.835,7972 - 34.600.686.478)\,US\$}{34.600.686.478\,US\$}$$

= 11,6%

Keterangan:

*) *Ekspor terkait 5 produk unggulan yaitu kopi, minyak sawit, kakao, tekstil dan produk tekstil (TPT) dan elektronik, yang telah tersedia sertifikasi SNI.*

Pertumbuhan kontribusi SPK terhadap ekspor produk unggulan nasional belum dapat dihitung secara maksimal, karena ekspor produk dipengaruhi oleh banyak faktor. Beberapa faktor yang dominan mempengaruhi ekspor menurut beberapa penelitian antara lain: nilai tukar uang, harga bahan bakar minyak, harga bahan baku, dan lain-lain. Faktor standar juga mempunyai kontribusi dalam pertumbuhan ekspor, namun besarnya kontribusi masih perlu dibuat model perhitungannya dan memerlukan data yang cukup.

Dari hasil perhitungan pertumbuhan ekspor produk unggulan nasional tersebut diatas yaitu sebesar 11,6%, artinya pada produk unggulan nasional yang telah ada mempunyai sertifikat SNI ekspor tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 11,6% dibandingkan tahun 2015 yaitu 38.629.320.836 US$ (2016) dari 34.600.686.478 US$ (2015).

Tahun	Inflasi	Harga BBM	Kurs Rupiah	Suku Bunga[1]	Jumlah sertifikat produk[2]	Nilai Ekspor komoditi (US$)[3]
2016	3,53	6750,00	13200,00	6,79	34	38.629.320.836
2015	6,38	7066,00	13350,00	7,52	16	34.600.686.478

<u>Capaian kinerja Deputi PKS dari segi *Customer Perspectives*</u>

III.1.2 Indikator kinerja persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan

Tabel 5 Indikator kinerja persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	SATUAN
2	Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan	2	Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan	40	44	%

[1] Data Bank Indonesia, website
[2] Data Pusat akreditasi Lembaga Sertifikasi (PALS-KAN) 2017
[3] Data BPS, ekspor komoditi Indonesia

Pada pengukuran yang dilakukan pada tahun sebelumnya tahun 2015 terhadap hasil penelitian tahun 2012 – 2013, tingkat pemanfaatan hasil penelitian hanya mencapai 18,09%. Pada pengukuran tahun 2016, diperoleh hasil tingkat pemanfaatan sebesar 44% (dari 11 penelitian). Capaian tersebut meningkat dari tahun sebelumnya dan lebih besar dari target yang ditetapkan. Hal ini memberikan indikasi bahwa program penelitian telah menuju kepada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan. Namun demikian pengukuran ini masih bersifat kuantitatif, selanjutnya Puslitbang perlu meningkatkan metode pengukuran kualitatif.

III.1.3 Indikator kinerja jumlah SNI yang difasilitasi pengembangannya

Tabel 6 Indikator kinerja Jumlah SNI yang difasilitasi pengembangannya

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	SATUAN
2	Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan	3	Jumlah SNI yang difasilitasi pengembangannya	100	122	SNI

Pada tahun 2016, fasilitasi perumusan SNI melalui adopsi standar internasional dengan metode republikasi-reprint, diberikan kepada 10 (sepuluh) Komite Teknis dan 1 (satu) Sub Komite Teknis dengan total 122 judul untuk dirumuskan menjadi SNI. Jumlah dan rincian distribusinya per Komtek/Sub Komtek dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7 Distribusi Fasilitasi Perumusan SNI Adopsi SI

No	Komtek	Fasilitasi RSNI
1	13-02 Keselamatan Pemanfaat Tenaga Listrik	15
2	29-08 Lengkapan Listrik	10
3	31-01 Elektronika Untuk Keperluan Rumah Tangga	6
4	83-01 Industri Karet dan Plastik	24
5	83-01-S2 Crumb Rubber	1
6	03-02 Sistem Manajemen Mutu	2
7	03-05 Lembaga Penilaian Kesesuaian	6
8	07-03 Nanoteknologi	10
9	17-04 Standar Dasar	5
10	19-05 Metode dan pengujian mikrobiologi	17
11	67-07 Analisis Sensori	26
	TOTAL	122

Dengan demikian target 100 judul SNI (indikator kinerja no 12) yang difasilitasi perumusannya pada tahun 2016 sudah terpenuhi, bahkan melebihi yakni 122 judul. (122 %).

Capaian kinerja Deputi PKS dari segi *Internal Process Perspectives*

III.1.4 Indikator kinerja jumlah SNI yang siap ditetapkan

Tabel 8 Indikator kinerja jumlah SNI yang difasilitasi pengembangannya

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	SATUAN
3 Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI	4 Jumlah SNI* yang siap ditetapkan	500	495	SNI

Keterangan: * RASNI diubah menjadi SNI

Kegiatan pengendalian proses perumusan SNI ini merupakan kegiatan yang mendukung tercapainya output SNI yang berkualitas dan taat asas. Hal yang dilakukan antara lain koordinasi dan penyelesaian masalah dengan Sekretariat Komite Teknis/Sub Komite Teknis, pengelolaan Sekretariat dan Komite Teknis serta pengendalian proses perumusan SNI baik di rapat teknis maupun rapat konsensus.

Mengacu pada penetapan kinerja PPS tahun 2016, target penetapan SNI yang ingin dicapai adalah 500 SNI, sementara realisasi penetapan SNI pada tahun 2016 mencapai 495 SNI (99%), yang terdiri dari : 335 SNI baru; 140 SNI revisi; 3 amandemen SNI; 3 ralat SNI, 13 SNI terjemahan dan 3 konfirmasi SNI hasil kaji ulang rekomendasi tetap. Selain itu juga ada SK penetapan abolisi untuk 38 SNI.

Capaian kinerja sedikit di bawah target disebabkan karena adanya pemotongan anggaran yang menyebabkan kegiatan pendukung tidak dapat dilaksanakan.

III.1.5 Indikator kinerja persentase hasil penelitian yang mendukung pengembangan standardisasi sebagai berikut

Tabel 9 Indikator kinerja persentase hasil penelitian yang mendukung pengembangan standardisasi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	Satuan
4 Meningkatnya kualitas penelitian bidang SPK	5 Persentase hasil penelitian yang mendukung pengembangan standardisasi	75	82	%

Capaian target jumlah penelitian tahun 2016 yang mendukung pengembangan standardisasi sebanyak 14 penelitian dari 17 penelitian (82% atau >75%) atau target tercapai 110%. Empat belas penelitian tersebut yaitu:

(1) Analisis Kebutuhan Standar untuk Memperkuat Pengujian Produk Berbasis Mikrobiologi dan Bioteknologi pada Sektor Pangan dan Pertanian,

(2) Standardisasi Kandungan Aflatoxin pada Produk Pala (Nutmeg) dalam Rangka Penguatan Posisi Indonesia dalam Pengembangan Standar Internasional,

(3) Standardisasi Selang Karet dan Seal Cap Tabung Gas LPG: Sebuah Upaya untuk Perlindungan K3L,

(4) Kandungan Metil Merkuri pada Ikan dalam Rangka Penguatan Posisi Indonesia dalam Pengembangan Standar Internasional,

(5) Pengaruh Standar Privat (*Private Standard*) Terhadap Akses Produk Indonesia ke Pasar Global Sektor Perikanan (*Marine*), Kehutanan dan Pertanian,

(6) Standar Metode Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada Perkebunan Kelapa Sawit dalam Mendukung Posisi Indonesia di TBT WTO,

(7) Efektivitas Implementasi dan Pengawasan Pemberlakuan Wajib SNI dalam Pengadaan Barang Meter Air,

(8) Analisis Kesesuaian Pemberlakuan SNI secara Wajib dalam Program Nasional Regulasi Teknis (PNRT) Berdasarkan Pedoman Standardisasi (PSN) 301,

(9) Kesesuaian Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) sesuai kebutuhan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*),

(10) *Regulatory Impact Analisys* (RIA) Bidang Standardisasi Terhadap Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Biskuit Secara Wajib,

(11) Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Pengembangan SNI Bidang Kemaritiman Pada Industri Kapal Nelayan dan Kapal Perintis Nasional,

(12) Metode Statistik dalam Standardisasi, Penilaian Kesesuaian dan Metrologi: Bagian 2 Penilaian Kesesuaian.

(13) Standardisasi Komponen Baterai Mobil Listrik

(14) Pengembangan SNI Produk Prioritas Perikanan dan Kelautan Propinsi Sulawesi Utara

Capaian terhadap target adalah 109% (82% dari 75% yang ditargetkan). Hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian masih konsisten sesuai dengan kebijakan BSN ditujukan sebagian besar untuk mendukung pengembangan standardisasi.

III.1.6 Indikator kinerja jumlah kajian/ penelitian yang mendukung penilaian kesesuaian

Tabel 10 Indikator kinerja jumlah kajian penelitian yang mendukung penilaian kesesuaian

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	Satuan
4 Meningkatnya kualitas penelitian bidang SPK	6 Jumlah kajian/ penelitian yang mendukung penilaian kesesuaian	1	1	penelitian

Capaian target jumlah penelitian tahun 2016 yang mendukung pengembangan penilaian kesesuaian sebanyak 1 penelitian dari 1 penelitian yang ditargetkan (tercapai 100%). Penelitian tersebut berjudul “Analisis Skema Sertifikasi dan Liabilitas Produk Elektrik-Elektronik (EE) pada Regulasi Teknis Berbasis SNI”. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 37,5% (3 dari 8 sampel) regulasi teknis berbasis SNI EE belum disertai Petunjuk Teknis (Juknis) yang memuat skema sertifikasi.

Skema sertifikasi yang dimaksud sebaiknya memuat aspek, yaitu kewajiban menyerahkan desain produk, uji tipe, audit jaminan mutu proses produksi dan tingkat Acceptance Quality Level (AQL). Dari sisi liabilitas, tingkat implementasi produsen EE (n=15) terhadap aspek liabilitas masih rendah, dengan demikian memperlihatkan belum populernya liabilitas produk di kalangan industri. Dari hasil penelitian ini pula telah disusun rekomendasi kepada regulator (pemerintah) yang memberlakukan regulasi teknis berbasis SNI dan juknis, Komite Akreditasi Nasional (KAN), Kementerian Hukum dan HAM dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dalam membuat kebijakan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

III.1.7 Indikator knerja jumlah kajian/ penelitian yang mendukung pengembangan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)

Capaian target jumlah penelitian tahun 2016 yang mendukung pengembangan SNSU sebanyak 1 penelitian dari 1 penelitian yang ditargetkan (tercapai 100%).

Penelitian tersebut berjudul “Analisis Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) di Indonesia”. Pengelolaan SNSU dapat menjamin transparansi sistem penyelenggaraan metrologi di forum Internasional, sehingga kredibilitas pengukuran di Indonesia mendapatkan pengakuan dari masyarakat internasional.

Tabel 11 Indikator kinerja jumlah kajian / penelitian yang mendukung pengembangan SNSU

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	Realisasi	Satuan
4	Meningkatnya kualitas penelitian bidang SPK	7	Jumlah kajian/ penelitian yang mendukung pengembangan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)	1	1	penelitian

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian dan peraturan perundang-undangan lainnya, tidak terdapat lagi ketentuan tentang pengelola teknis ilmiah SNSU. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2014 Pasal 43, ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan SNSU dilakukan oleh BSN, kemudian pada ayat (2) menyatakan bahwa dalam melakukan pengelolaan SNSU, BSN bekerjasama dengan Kementerian/LPNK lain berdasarkan kompetensi teknisnya. Dari hasil penelitian ini pula telah disusun rekomendasi kepada (1) Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi; (2) Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bidang Ekonomi; (3) Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), (4) Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga – Kementerian Perdagangan, dan (5) Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional – BATAN, dalam membuat kebijakan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuain.

III.1.8 Indikator kinerja jumlah hasil penelitian yang mendukung kepentingan Indonesia di forum TBT WTO

Capaian target jumlah penelitian tahun 2016 yang mendukung kepentingan Indonesia di forum internasional di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian sebanyak 3 (tiga) penelitian dari 1 (satu) penelitian yang ditargetkan (tercapai 100%).

Tabel 12 Indikator kinerja jumlah hasil penelitian yang mendukung kepentingan Indonesia

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	Satuan
4 Meningkatnya kualitas penelitian bidang SPK	8 Jumlah hasil penelitian yang mendukung kepentingan Indonesia di forum TBT WTO	1	3	penelitian

Tiga penelitian tersebut berjudul:

1) Standardisasi Kandungan Aflatoxin pada Produk Pala (Nutmeg) dalam Rangka Penguatan Posisi Indonesia dalam Pengembangan Standar Internasional,
2) Kandungan Metil Merkuri pada Ikan dalam Rangka Penguatan Posisi Indonesia dalam Pengembangan Standar Internasional,
3) Standar Metode Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada Perkebunan Kelapa Sawit dalam Mendukung Posisi Indonesia di TBT WTO.

Penelitian tentang pala dan ikan tersebut di atas ditujukan untuk mendukung kepentingan Indonesia di forum *Codex Alimentarius Commission* (CAC) yaitu organisasi standar dunia khusus bidang pangan dan kesehatan. Dari hasil penelitian tentang kandungan aflatoxin pada pala, telah disusun rekomendasi kepada Pusat Perumusan Standar, Komite Teknis Perumusan Standar bidang makanan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dan Kementerian Pertanian dalam rangka membuat kebijakan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuain. Sedangkan dari hasil penelitian tentang metil merkuri pada ikan, juga telah disusun rekomendasi kepada Pusat Perumusan Standar, Komite Teknis Perumusan Standar bidang makanan dan BPOM, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka membuat kebijakan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuain.

Penelitian tentang gas rumah kaca (GRK) dimaksudkan untuk mendukung posisi Indonesia dalam forum TBT-WTO, berkenaan dengan emisi GRK dari *palm oil renewable diesel* dan *palm oil biodiesel* Indonesia yang masing-masing hanya dapat memenuhi 11 dan 17 persen batas pengurangan emisi GRK, dinilai tidak memenuhi persyaratan energi terbarukan yang harus memenuhi ketentuan minimum 20 persen ambang batas pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Dari hasil penelitian ini telah disusun rekomendasi kepada (1) Pusat Kerjasama Standardisasi BSN dalam memberikan data terkait metode perhitungan emisi GRK pada perkebunan kelapa sawit di Indonesia, (2) Pusat Perumusan Standar BSN dalam usulan perumusan SNI terkait metode perhitungan emisi GRK pada perkebunan kelapa sawit, dan (3) Komisi ISPO - Kementerian Pertanian

dalam membuat kebijakan terhadap penerapan metode perhitungan emisi GRK pada perhitungan kelapa sawit di Indonesia.

III.1.9 Indikator kinerja persentase rekomendasi hasil kerjasama standardisasi yang mendukung pengembangan SNI

Tabel 13 Indikator kinerja persentase rekomendasi hasil kerjasama standardisasi yang mendukung pengembangan SNI

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	Satuan
5 Meningkatnya kualitas kerjasama bidang SPK	9 Persentase rekomendasi hasil kerjasama standardisasi yang mendukung pengembangan SNI	75	60	%

Untuk mencapai target tersedianya rekomendasi hasil kesepakatan kerjasama untuk pengembangan SNI sebesar 75%, upaya yang dilakukan adalah dengan mengembangkan kerjasama baik di tingkat nasional (kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan pihak swasta) dan internasional (kerjasama bilateral, regional dan multilateral).

1. <u>Kerjasama Standardisasi Dalam Negeri</u>

Dalam kerangka pengembangan dan pembinaan standardisasi dalam negeri, BSN pada tahun 2016 telah melakukan kegiatan perintisan kerjasama sebanyak enam daerah yaitu Pemkab. Kaur, Pemkab. Pamengkasan, Pemkab Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, Pemprov. Yogyakarta, Pemkot Surakarta, dan telah menandatangani sebanyak 31 (tiga puluh satu) dokumen Kesepakatan Bersama dan 4 (empat) Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah/Pemprov/Universitas.

Selain Kegiatan Implementasi MoU dengan Pemerintah Daerah, di tahun 2016 PKS melakukan Kegiatan Implementasi kepada Perguruan Tinggi yang telah melakukan MoU.

Implementasi dari kesepakatan bersama tersebut diatas dilakukan dalam bentuk sosialisasi/workshop/seminar kerjasama standardisasi dengan topik terkait standardisasi seperti peran standardisasi bagi peningkatan daya saing produk unggulan daerah, penerapan SNI bagi UKM produk unggulan daerah, regulasi berbasis SNI, sertifikasi

produk untuk UMKM, penerapan SNI pada produk olahan makanan dan minuman, dan sistem manajemen energi.

2. Kerjasama Standardisasi Internasional

Kerjasama standardisasi internasional difokuskan pada kerjasama di tingkat bilateral, regional dan multilateral.

a. Forum Bilateral

Kerjasama di tingkat bilateral diarahkan guna mendukung pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) melalui tukar menukar informasi mengenai pengembangan standar di kedua negara. Hal ini ditindaklanjuti dengan merekomendasikan pengembangan standar melalui adopsi standar ke dalam standar nasional. Kerjasama dilakukan dengan institusi di negara mitra yang bertanggung jawab dalam pengembangan standardisasi termasuk badan standardisasi nasional (NSB) maupun dengan organisasi pengembang standar (SDO). Selain itu, kerjasama di tingkat bilateral juga diarahkan untuk memfasilitasi perdagangan termasuk bidang standar dan keberterimaan hasil uji dan sertifikat produk oleh lembaga sertifikasi produk antar kedua negara.

Dalam konteks kerjasama Bilateral, pada tahun 2016, BSN telah menandatangani 2 (dua) MoU dengan NSBs/SDOs, yaitu:

- National Association of Corrosion Engineers (NACE). MoU berlaku secara efektif mulai tanggal 30 November 2016. Penandatanganan MoU dilakukan secara desk to desk, di mana pihak BSN diwakili oleh Dr. Ir. Puji Winarni, M.A., selaku Plt. Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi, sedangkan pihak NACE diwakili Robert H. Chalker, selaku Chief Executive Officer (CEO) of NACE.
- *Bureau of Indian Standards* (BIS), ditandatangani pada tanggal 12 Desember 2016 di New Delhi, India bersamaan dengan kunjungan Presiden RI. Dalam penandatanganan MoU ini, BSN diwakili oleh pihak Kementerian Luar Negeri RI.

b. Forum Regional ASEAN.

Menuju implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2016, BSN aktif dalam memberikan tanggapan/posisi Indonesia atas isu-isu standar dan penilaian kesesuaian ASEAN. Pelaksanaan MEA dengan tujuan terciptanya kawasan pasar tungal dan basis produksi dilakukan melalui integrasi 12 sektor prioritas (PIS). Namun hanya terdapat 6 sektor dari PIS yang terkait dengan aspek standardisasi dan penilaian kesesuaian yaitu *electronic, healthcare, otomotif, rubber based*

products, wood based products, dan agro based products. Upaya integrasi 6 (enam) sektor tersebut dilakukan dalam bentuk harmonisasi standar, penilaian kesesuaian dan regulasi teknis antar negara anggota ASEAN. Ketiga proses harmonisasi tersebut sangat diperlukan untuk terciptanya keberterimaan hasil uji dan sertifikat produk antara negara ASEAN sehingga terwujud arus pergerakan barang intra ASEAN yang lebih mudah, bebas dengan tetap memenuhi aspek mutu serta keamanan bagi konsumen.

Pada 2016, ASEAN *Standards and Conformance Strategic Plan* 2016-2025 dan *sub sector action plan* masing-masing WG/PWG telah disetujui oleh *Senior Economic Officials Meeting* (SEOM). Semua program kegiatan WG dan PWG tersebut harus sinergi dengan sasaran dan komitmen pemimpin ASEAN dalam AEC Blue Print 2016-2025.

c. Forum APEC SCSC.

Sebagai anggota ekonomi forum *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC), BSN telah berperan aktif di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian serta bertindak sebagai *focal point point* nasional di forum *APEC on Sub Committee on Standard and Conformance* (APEC SCSC). Hal ini merupakan bagian komitmen Indonesia dalam mencapai dan mewujudkan *APEC Bogor Goals*.

Dalam forum APEC SCSC, BSN menyampaikan update secara regular *Collective Action Plan (CAP)* dan *Voluntary Action Plan (VAP)* serta aktif dalam memberikan input dan tanggapan dalam setiap project APEC yang dikirimkan oleh anggota ekonomi APEC lain, salah satunya adalah APEC *Project on Silver Economy* dari Australia. Dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia, BSN secara rutin mengirimkan wakil dari internal BSN dan K/LPNK terkait untuk mengikuti berbagai pelatihan APEC yang dilaksanakan oleh anggota ekonomi APEC lain. Kemudian BSN turut berpartisipasi aktif dalam menghadiri pertemuan Plenary APEC SCSC 1 dan 2 untuk menyampaikan posisi dan kepentingan Indonesia serta laporan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Indonesia (CAP dan VAP). Pada tahun 2016, BSN menghadiri sidang APEC SCSC 1 pada tanggal 21-22 Februari 2016 di Lima, Peru. Sedangkan untuk APEC SCSC 2, BSN tidak menghadiri pertemuan tersebut dikarenakan adanya pemotongan anggaran yang signifikan.

d. Forum PASC

BSN berpartisipasi aktif dalam forum *Pasific Asia Standard Congress* (PASC), forum yang memfasilitasi perkembangan standardisasi tingkat regional dan internasional yang beranggotakan 24 negara di kawasan Asia Pasifik. Indonesia dapat memanfaatkan forum PASC untuk menggalang dukungan dalam pemilihan posisi atau jabatan strategis di forum ISO, IEC dan ITU-T sehingga kepentingan Indonesia di bidang standardisasi dapat diperjuangkan secara lebih maksimal.

Pada tahun 2016, BSN mendapat kesempatan untuk menjadi tuan rumah dalam pertemuan PASC ke 39 yang diselenggarakan pada tanggal 9-13 Mei 2016. Pertemuan diawali dengan Workshop yang bertema *"How to Engage MSME's in Standardization Activities"* dan membahas topik penting yang dipandang sangat relevan dengan keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dikaitkan dengan Standar. Workshop tersebut dibagi menjadi 4 (empat) sesi dan menghadirkan pembicara dari negara anggota PASC termasuk Indonesia. Beberapa kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut yang perlu dilakukan antara lain:

1. peningkatan komunikasi dan pertukaran informasi antar negara anggota PASC dengan stakeholder terkait (industri, UMKM, regulator dan lembaga penilaian kesesuaian) melalui website yang sedang dikembangkan oleh Sekretariat PASC;
2. kerjasama dengan organisasi internasional seperti perwakilan ISO/IEC di Asia Pasifik untuk mempromosikan pengembangan New Work Item Proposal (NWIP) oleh UMKM;
3. kerjasama dengan APEC SCSC, ASEAN dan NGO untuk mendukung peningkatan kapasitas dan akses UMKM;
4. usulan capacity building untuk UMKM dengan menggunakan teknologi atau platform online seperti Coursera untuk mengembangkan program pelatihan bagi UMKM dalam memahami penggunaan dan akses standar.
5. melakukan survey tentang kebutuhan riil UMKM. Hasil survey akan menjadi acuan dalam penentuan jenis capacity building yang dibutuhkan oleh UMKM.

e. Forum FTA

BSN berpartisipasi aktif dalam forum negosiasi ASEAN dengan negara mitra baik ASEAN + 1 Negara Mitra maupun ASEAN + 6 (RCEP). Dalam forum

ini, partisipasi BSN adalah dalam negosiasi di bidang S*tandard, Technical Regulations, dan Conformity Assessment (STRACAP)*. Selama tahun 2016, telah dihasilkan dua kertas posisi dalam rangka partisipasi BSN dalam forum ASEAN + 1 (ASEAN-China FTA Sub Committee on STRACAP ke-4, dan ASEAN-Hongkong Working group on STRACAP ke-4). Dalam forum RCEP, telah dihasilkan empat kertas posisi dalam rangka memperkuat Delegasi Indonesia dalam mengikuti negosiasi RCEP (ke-8, 9, 10 dan 11).

BSN juga berpartisipasi dalam perundingan bilateral Indonesia – Australia *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA CEPA) dan Indonesia – EU CEPA untuk memperkuat posisi Indonesia khususnya dibidang STRACAP.

f. Forum Kerjasama Multilateral

Kegiatan difokuskan pada penguatan posisi Indonesia khususnya dalam kontribusi dan partisipasi aktif Indonesia dalam perumusan standar internasional ISO dan IEC, serta memfasilitasi kerjasama dalam mendukung perumusan SNI, dan implementasinya dalam mendukung perdagangan. Hal ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan stakeholders terkait baik kementerian/lembaga maupun pihak swasta.

Di bidang kelistrikan, pada tahun 2016 Indonesia menyelenggarakan seminar dalam rangka kunjungan Sekretaris *International Electrotechnical Commision System of Conformity Assesment Schemes for Electrotechnical Equipment and Component* (IECEE). Hal ini dimanfaatkan sebagai moment pertemuan dan ajang diskusi dengan stakeholder penilaian kesesuaian bidang ketenagalistrikan yang dihadiri sekitar 40 peserta. Dalam pertemuan ini telah diidentifikasi permasalahan beserta tindaklanjutnya, yang dihadapi National Certification Body (NCB) – Certification Body Test Laboratory (CBTL) Indonesia dalam memperoleh klien IEC Certification Body Scheme (IEC CB Scheme).

Salah satu syarat anggota International Electrotechnical Committee (IEC) adalah membentuk Komite Nasional. BSN sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pembinaan standardisasi membentuk Komite Nasional untuk IEC (KOMNAS IEC) Indonesia yang beranggotakan wakil-wakil dari para pemangku kepentingan terkait. Pada tahun 2016, KOMNAS IEC telah melaksanakan dua kali pertemuan tahunan yang membahas kebijakan nasional di bidang kelistrikan dan partisipasi aktif stakeholders Indonesia dalam kegiatan standardisasi IEC.

Dalam forum pengembangan standar ISO dan IEC, BSN berperan aktif dalam memberikan tanggapan terhadap draft internasional standar. Hal ini

dimaksudkan untuk meningkatkan keberterimaan SNI. Selama tahun 2016, BSN telah memberikan tanggapan sebanyak 960 draft ISO (100%) dan 396 buah (100%) untuk draft IEC

III.1.10 Indikator kinerja Persentase penanganan permintaan notifikasi dan *inquiry* dalam rangka memenuhi perjanjian TBT-WTO

Tabel 14 Indikator kinerja persentase penanganan permintaan notifikasi dan *inquiry* dalam rangka memenuhi perjanjian TBT WTO

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	Realisasi	Satuan
5	Meningkatnya kualitas kerjasama bidang SPK	10	Persentase penanganan permintaan notifikasi dan inquiry dalam rangka memenuhi perjanjian TBT WTO	100	100	%

Selama tahun 2016, BSN sebagai Notification Body (NB) dan *Enquiry Point* (EP) telah menyampaikan notifikasi rancangan maupun regulasi teknis ke Sekretariat WTO (*outgoing notification*) melalui TBT *Notification submission System* (TBT NSS), merespon pertanyaan (*enquiry*) dari anggota WTO atas regulasi teknis Indonesia dan merespon notifikasi regulasi teknis dari anggota WTO (*incoming notification*). Jumlah notifikasi serta *enquiry* yang disampaikan oleh Indonesia pada Tabel 15.

Tabel 15 Penanganan *outgoing* notifikasi dan *Enquiry* pada subbidang notifikasi Pusat Kerjasama Standardisasi BSN

	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
Notifikasi Regulasi Teknis	16	14	9	12	8
Adendum	22	9	23	8	4
Enquiry	45	53	76	43	47

Selama tahun 2016 terdapat kurang lebih 1.398 notifikasi yang diterima oleh BSN dan beberapa diantaranya dianggap berpotensi menghambat akses pasar Indonesia ke negara yang menjadi tujuan ekspor Indonesia. BSN melakukan rapat kooordinasi dengan

beberapa K/L terkait untuk pembahasan hambatan perdagangan terkait antara lain: Country of origin labelling dari Australia,

Microbeads pada produk kosmetik, produk kayu dari Korea, produk pangan dari EU, Canada Tobacco, Methylisothiazolinone pada produk kosmetik. Selain hal tersebut diatas, beberapa regulasi teknis negara anggota WTO telah ditanggapi oleh Indonesia antara lain kebijakan rokok Canada, *Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products.*

Capaian kinerja Deputi PKS dari segi Learning and Growth Perspectives

III.1.11 Indikator kinerja Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Deputi PKS yang meningkat Kompetensinya

Tabel 16 Indikator kinerja persentase ASN Deputi PKS yang meningkat kompetensinya

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	Satuan
6 Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi Deputi PKS yang profesional	11 Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Deputi PKS yang meningkat kompetensinya	100	90	%

Capaian persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meningkat kompetensinya di Deputi PKS sebanyak 90% yaitu 86 dari 95 personil telah ditingkatkan kompetensinya melalui antara lain:

- Pelatihan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 sebanyak 80 personil
- Magang di perusahaan sebanyak 6 personil
- Workshop Internal Skema SNI Wajib sebanyak 40 personil
- Workshop Internal lingkup K3L sebanyak 40 personil
- Pelatihan penulisan Karya Tulis Ilmiah sebanyak 10 personil
- Pengembangan ASN perlu ditingkatkan secara terus menerus melalui pembelajaran baik pembelajaran internal maupun melalui pembelajaran ekternal (pelatihan, magang, seminar, *workshop*).

III.1.12 Indikator kinerja realisasi anggaran Deputi PKS

Tabel 17 Indikator kinerja realisasi anggaran Deputi PKS

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	Satuan
6 Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi Deputi PKS yang profesional	12 Realisasi anggaran Deputi PKS	>95	84,95	%

Capaian realisasi anggaran Deputi PKS 2016 sebesar Rp. 12.716.367.739 dari Rp 14.969.761.000 (tercapai 84,95%). Dari pagu Deputi PKS kurang optimalnya realisasi anggaran karena pada tahun 2016 terjadi *self blocking* anggaran secara nasional sebesar Rp. 2.251.452.054 (15,04%).

III.1.13 Indikator kinerja Jumlah *e-governance* yang mendukung tata kelola Deputi PKS

Tabel 18 Indikator kinerja realisasi anggaran Deputi PKS

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	Satuan
6 Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi Deputi PKS yang profesional	13 Realisasi anggaran Deputi PKS	2	1	aplikasi

Capaian jumlah e-governance yang mendukung sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi Deputi PKS sebanyak 1 aplikasi dari 2 aplikasi yang ditargetkan (tercapai 50%). Deputi PKS berhasil mengembangkan satu (1) aplikasi sistem database yang disebut repositori penelitian yang memuat data penelitian termasuk data primer penelitian, data sekunder penelitian, data personel penelitian, data dukung lainnya, serta hasil penelitian baik berupa full text maupun statistik. Database ini dapat diakses melalui alamat internet: repositori.bsn.go.id oleh seluruh personel Puslitbang menggunakan password tertentu. Pembuatan repositori ini untuk menunjang kegiatan penelitian di BSN. Sedangkan 1 (satu) aplikasi website TBT-WTO tidak terealisasi.

III.2 Realisasi Anggaran

Untuk mendukung pencapaian kinerja Deputi PKS, disediakan pagu anggaran sebesar 14.969.761.000. Jumlah anggaran yang dapat direalisasikan selama tahun 2016 adalah sebesar Rp 12.716.367.739,-.

Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Perumusan Standar	5.183.795.000	5.120.006.129	98,77
Kerjasama Standardisasi	5.317.846.000	4.166.943.659	78,36
Penelitian dan Pengembangan Standardisasi	4.468.120.000	3.429.417.951	76,75
Total	14.969.761.000	12.716.367.739	84,95

Secara keseluruhan target realisasi anggaran tahun 2016 untuk kegiatan perumusan SNI telah dapat dicapai dengan baik (98,77 %), meskipun demikian masih ada beberapa kegiatan yang realisasinya di bawah 90 % karena beberapa kendala.

Untuk kegiatan kerjasama standardisasi, dari pagu yang tersedia telah mampu direalisasikan sebesar 78,36%. Walaupun anggaran yang tersedia belum dapat direalisasikan seluruhnya, karena pada tahun 2016 terjadi *self blocking* anggaran secara nasional.

Sementara itu untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, realisasi yang dapat dicapai adalah 76,75%. Hal tersebut juga karena terjadi *self blocking* anggaran, sehingga anggaran menjadi terbatas untuk pengambilan data primer, sehingga mengakibatkan pengumpulan data primer yang dibutuhkan belum tercapai secara optimal. *Self blocking* anggaran untuk kegiatan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan sebesar Rp 861.970.000,00. Realisasi anggaran tanpa *self blocking* dapat dicapai sebesar Rp 3.429.417.951,00 dari Rp 3.606.150.000,00 (95,10%).

BAB IV

PENUTUP

Sasaran kinerja Deputi PKS yang utama adalah terwujudnya pengembangan SNI sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan dengan memperhatikan perkembangan perumusan standar internasional serta dengan didukung oleh hasil penelitian atas kebutuhan SNI dan dampak implementasi SNI. Capaian kinerja tahun 2016 Deputi PKS secara umum dapat diwujudkan sesuai yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja Deptui PKS 2016. Dari sisi kinerja substansi, 6 (enam) sasaran yang ditargetkan untuk dicapai di tahun 2016 beserta realisasinya.

Capaian kinerja Deputi PKS dari segi perspektif stakeholder (Stakeholder Perspectives) yang diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu pertumbuhan kontribusi SPK terhadap ekspor produk unggulan nasional diperoleh capaian 11,6%.

Capaian kinerja Deputi PKS dari segi perspektif pelanggan (Customer Perspectives) yang diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan diperoleh capaian 44% dan jumlah SNI yang difasilitasi pengembangannya diperoleh capaian 100%.

Capaian kinerja Deputi PKS dari segi perspektif proses internal (Internal Process Perspectives), yang mencakup 2 sasaran strategis yaitu (1) Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI dengan 1 (satu) indikator yaitu jumlah SNI yang siap ditetapkan dengan capaian 495 SNI 99%); dan (2) Meningkatnya kualitas penelitian bidang SPK dengan 4 (empat) indikator yaitu persentase hasil penelitian yang mendukung pengembangan standardisasi dengan capaian 82%, jumlah kajian/penelitian yangmendukung penilaian kesesuaian dengan capaian 1 penelitian (100%), Jumlah kajian/ penelitian yang mendukung pengembangan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) 1 penelitian (100%), Jumlah hasil penelitian yang mendukung kepentingan Indonesia di forum TBT WTO dengan capaian 3 penelitian (300%); (3) Meningkatnya kualitas kerjasama bidang SPK dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu persentase rekomendasi hasil keriasama standardisasi yang mendukung pengembangan SNI dengan capaian 60% dari 75% yang ditargetkan (80 %) dan persentase penanganan permintaan notifikasi dan inquiry dalam rangka memenuhi perjanjian TBT WTO dengan capaian 100%.

Capaian kinerja Deputi PKS dari segi perspektif pembelajaran (Learning and Growth Perspectives) dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan capaian 86 ASN dari 95 ASN (90%), realisasi anggaran Deputi

PKS dengan capaian 84,95%, dan jumlah e-governance yang mendukung tata kelola Deputi PKS 2 aplikasi dari 3 aplikasi (67%).

Walaupun terjadi pemotongan anggaran, secara umum kinerja substansi utama masih dapat dicapai, yaitu output utama dari unit-unit Pusat yang ada di Deputi PKS. Untuk memperbaiki kinerja substansi Deputi PKS pada tahun-tahun yang akan datang, perlu dilakukan beberapa hal, diantaranya:

Perlu dilakukan penguatan koordinasi dengan Komtek/SubKomtek yang berada di Kementerian dan Lembaga untuk memastikan proses perumusan SNI yang taat asas sesuai ketentuan Perka BSN dan mencapai tujuan yang ditargetkan

Kegiatan kerjasama standardisasi perlu difokuskan pada standardisasi produk potensial Indonesia dan untuk kegiatan kerjasama internasional yang sifat implementasinya mengikat pemerintah Indonesia

Penelitian di bidang standardisasi perlu difokuskan pada arah kebijakan nasional, kebijakan BSN dan sektor prioritas yang ditetapkan dan difokuskan pada penelitian pengembangan standardisasi, dengan perbaikan pada penganggaran penelitian yang tetap (tidak terganggu kebijakan pemotongan anggaran).

Dari sisi realisasi anggaran, dari anggaran awal yang tersedia sebesar Rp. 14.969.761.000,-. Dari jumlah anggaran yang tersedia tersebut berhasil direalisasikan sebesar 84,95 % atau sebesar Rp 12.716.367.739,-. Sisa anggaran yang tidak dapat direalisasikan sebagian besar karena tingkat kehadiran para nara sumber dalam berbagai kegiatan belum optimal. Di samping itu karena adanya selisih antara standar harga satuan dengan harga yang sesungguhnya di pasar, dimana sebagian besar harga realisasi lebih rendah dari harga satuan. Untuk memperbaiki kinerja anggaran pada tahun-tahun yang akan datang, perlu diperbaiki penyusunan dokumen perencanaan, terutama yang berkaitan dengan perkiraan harga atau biaya sesuai dengan kondisi saat itu.

LAMPIRAN A

RENCANA STRATEGIS DEPUTI PKS- BSN 2015 – 2019

No	Sasaran	Indikator	Target					Satuan
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Meningkatnya RASNI yang siap ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan	Jumlah RASNI yang siap ditetapkan	8762	9262	9762	10262	10762	Dokumen RASNI
2	Memastikan tersedianya rekomendasi hasil kerjasama yang mendukung pengembangan SNI	Persentase rekomendasi hasil kerjasama standardisasi yang mendukung pengambangan SN	70%	75%	75%	80%	80%	Persentase
3	Meningkatnya kerjasama bidang standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian di tingkat nasional, bilateral, regional dan internasional untuk mendukung kepentingan Indonesia di forum perdagangan global	Jumlah kerjasama bidang standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian di tingkat nasional, bilateral, regional dan internasional	44	52	60	68	76	Dokumen kerjasama
4	Memastikan fungsi notifikasi dan inquiry dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum TBT WTO	Persentase penanganan permintaan notifikasi dan inquiry dalam rangka memenuhi perjanjian TBT WTO	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
5	Memastikan tersedianya hasil penelitian mendukung pengembangan SNI, penilaian kesesuaian dan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)	Persentase hasil penelitian yang mendukung pengembangan SNI, penilaian kesesuaian dan Standar	70%	75%	75%	80%	80%	Persentase

No	Sasaran	Indikator	Target					Satuan
			2015	2016	2017	2018	2019	
		Nasional Satuan Ukuran (SNSU)						
6	Memastikan tersedianya hasil penelitian mendukung kepentingan Indonesia di forum TBT WTO	Jumlah hasil penelitian yang mendukung kepentingan Indonesia di forum TBT WTO	2	3	4	5	6	Dokumen hasil penelitian

LAMPIRAN B

Penetapan Kinerja Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi

Tahun 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DEPUTI BIDANG PENELITIAN DAN KERJASAMA STANDARDISASI
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Stakeholder Perspectives		
1 Meningkatnya daya saing produk berstandar	1 Pertumbuhan kontribusi SPK terhadap ekspor produk unggulan nasional	5 %
Customer Perspectives		
2 Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan	2 Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan	40 %
	3 Jumlah SNI yang difasilitasi pengembangannya	100 SNI
Internal Process Perspectives		
3 Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI	4 Jumlah RASNI yang siap ditetapkan	9262 RASNI
4 Meningkatnya kualitas penelitian bidang SPK	5 Persentase hasil penelitian yang mendukung pengembangan SNI	75 %
	6 Jumlah kajian/penelitian yang mendukung penilaian kesesuaian	3 penelitian
	7 Jumlah kajian/penelitian yang mendukung pengembangan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)	1 penelitian
	8 Jumlah hasil penelitian yang mendukung kepentingan Indonesia di forum TBT WTO	3 penelitian
5 Meningkatnya kualitas kerjasama bidang SPK	9 Persentase rekomendasi hasil kerjasama standardisasi yang mendukung pengembangan SNI	75 %
	10 Persentase penanganan permintaan notifikasi dan inquiry dalam rangka memenuhi perjanjian TBT WTO	100 %
Learning and Growth Perspectives		
6 Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi Deputi PKS yang profesional	11 Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Deputi PKS yang meningkat kompetensinya	100 %
	12 Realisasi anggaran Deputi PKS	≥95 %
	13 Jumlah *e-governance* yang mendukung tata kelola Deputi PKS	4 Aplikasi

Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1 Kerjasama Standardisasi	7,379,516,000
2 Penelitian dan Pengembangan Standardisasi	4,634,800,000
3 Perumusan Standar	6,648,371,000
Jumlah	18,662,687,000

Jakarta, Maret 2016

Pihak Kedua

Bambang Prasetya

Pihak Pertama

Puji Winarni

LAMPIRAN C

Tugas Pokok dan Fungsi

Deputi Bidang Penelitian Dan Kerjasama Standardisasi

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang perumusan standar, penelitian dan pengembangan serta kerjasama di bidang standardisasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan, perumusan dan penetapan Standar Nasional serta kerjasama di bidang standardisasi;

b. Penyusunan rencana dan program nasional di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan, perumusan dan penetapan standar nasional serta kerjasama di bidang standardisasi;

c. Pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan serta pengendalian kegiatan di bidang penelitian, pengkajian, dan kerjasama di bidang standardisasi, serta pengembangan, perumusan dan penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI);

d. Pembinaan dan penyelenggaraan kerjasama dalam negeri dan luar negeri di bidang standardisasi dengan badan-badan nasional dan internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi.

Susunan organisasi Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi terdiri dari :

1. Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi;

2. Pusat Perumusan Standar;

3. Pusat Kerjasama Standardisasi

Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi	Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang penelitian dan pengembangan standardisasi dalam aspek perumusan standar, penerapan standar, akreditasi, informasi dan pemasyarakatan standardisasi serta kerjasama standardisasi, dan kegiatan lain yang terkait. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi menyelenggarakan fungsi: 1. Penyiapan rumusan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan; 2. Pembinaan dan koordinasi program di bidang penelitian dan pengembangan; 3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan standardisasi; 4. Penyusunan program dan tata operasional penelitian dan pengembangan; 5. Pelaksanaan kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan; 6. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian dan pengembangan.
Pusat Perumusan Standar	Pusat Perumusan Standar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang pengembangan sistem perumusan perumusan dan evaluasi Standar Nasional Indonesia, serta menyusun pedoman di bidang Metrologi teknik, Standar dan evaluasi Uji dan Kualitas (MSUK), dan pemberian tanggapan terhadap konsep standar baik secara bilateral, regional maupun international Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, Pusat Perumusan Standar menyelenggarakan fungsi: 1. penyiapan rumusan kebijakan di bidang perumusan dan revisi

Standar Nasional Indonesia;

2. pembinaan dan pengembangan sistem perumusan Standar Nasional Indonesia;
3. perumusan dan revisi Standar Nasional Indonesia;
4. pelaksanaan evaluasi perumusan dan revisi Standar Nasional Indonesia.

Pusat Kerjasama Standardisasi

Pusat Kerjasama Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang notifikasi dan kerjasama teknis perdagangan, kelembagaan standardisasi dalam negeri maupun luar negeri serta kegiatan lain sesuai dengan lingkup kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Pusat Kerjasama Standardisasi menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan rumusan kebijakan di bidang kerjasama teknis perdagangan, kelembagaan standardisasi dan kegiatan notifikasi;
2. perencanaan program di bidang kerjasama teknis perdagangan, kelembagaan standardisasi dan kegiatan notifikasi;
3. pembinaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan, dan evaluasi di bidang kerjasama teknis perdagangan, kegiatan Panitia Nasional dan Kelompok Kerja serta kegiatan notifikasi;
4. pelaksanaan kerjasama di bidang kelembagaan standardisasi lintas sektoral dan daerah;
5. pelaksanaan urusan pengelolaan keanggotaan Indonesia dalam organisasi standardisasi dan kerjasama dengan badan standardisasi di tingkat bilateral, regional maupun internasional;
6. pelaksanaan pengembangan sistem, mekanisme serta prosedur untuk bidang notifikasi dan kerjasama teknis perdagangan, kerjasama standardisasi internasional dan kerjasama standardisasi dalam negeri.